

Sembilan Perusahaan Terbaik Terima Penghargaan



KR-Budiono

Ganjar Pranowo Menyerahkan penghargaan kepada perusahaan berprestasi di Jateng.

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan penghargaan Siddhakarya kepada sembilan perusahaan terbaik di Jateng. Penghargaan diberikan atas prestasi yang dicapai oleh perusahaan. Diharapkan pemberian penghargaan tersebut menjadi inspirasi perusahaan kecil, menengah, dan besar lain untuk menghasilkan produk berkualitas.

Ganjar Pranowo menyampaikan hal itu kepada wartawan usai menyerahkan penghargaan Siddhakarya di Semarang, Rabu (31/8). Ditegaskan, pihaknya selalu memberikan penghargaan kepada perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar yang punya prestasi. "Penghargaan ini selalu memunculkan juara-juara yang kita harapkan bisa menginspirasi perusahaan lain untuk ikutan. Ya kualitasnya, manajemennya, pengelolaan kualitas produk, serta manajemen perusahaan dan sumber daya manusia yang bekerja," tutur Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar, perusahaan yang menerima penghargaan itu telah membuktikan bahwa selama ini sudah berjuang untuk menghasilkan produk yang berkualitas, seperti usaha kecil asal Purworejo yang memproduksi minyak goreng kelapa atau pure coconut oil (PCO). Meskipun tergolong usaha kecil, CV Tiga Putri berhasil mengelola bahan berupa kelapa dengan baik, sehingga menghasilkan banyak produk dengan banyak keuntungan. PT Tiga Putri dinilai berhasil mengolah kelapa menjadi banyak produk. Mulai dari batok kelapa, ampas kelapa yang menghasilkan banyak produk turunan, dan produk utamanya minyak goreng.

Usaha kecil lain yang juga mendapatkan juara 1 adalah PT Savana Antik asal Rembang. Perusahaan ini memproduksi furniture skala kecil. Limbah furniture bisa dimanfaatkan dengan dibuat aksesoris dinding dan dekorasi rumah. "Ada juga perusahaan kayu yang sebenarnya usaha skala kecil, tetapi memiliki pabrik di luar negeri. Ada furniture, kayu limbahnya bisa dibuat aksesoris dinding." (Bdi)

Realisasi PBB Salatiga Rp 9,017 Miliar

SALATIGA (KR) - Pajak Bumi Bangunan (PBB) Salatiga tahun 2022 hingga akhir bulan Agustus terealisasi Rp 9,017 miliar. Jumlah ini kurang lebih 90,17 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 10 miliar. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BP-KPD) Salatiga, Slamet Setyo Budi menjelaskan realisasi tersebut masih sampai 29 Agustus 2022. Setidaknya masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk memenuhi target pendapat PBB tahun 2022 ini.

"Sampai akhir bulan Agustus 2022 pendapatan PBB sudah masuk atau terealisasi Rp 9,017 miliar. Semoga sisa waktu yang ada bisa terpenuhi targetnya," kata Slamet Setyo Budi, Rabu (31/8). Dari data di BPKPD, jumlah wajib pajak (WP) PBB sebanyak 77.000.

Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada 2021 lalu, kurang lebih berjumlah 76.200 wajib pajak. Sebagai perbandingan, PBB tahun 2021 dengan target yang sama, Rp 10 miliar, realisasinya melebihi target, yakni 10.217.703.981. Saat ini pihak BPKPD menurut Slamet Setyo Budi berupaya maksimal untuk meningkatkan pemasukan dari sektor PBB dengan sosialisasi yang optimal. (Sus)

Kemenkominfo Gelar Workshop Digitalisasi Pendidikan

KLATEN (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Ekonomi Digital menyelenggarakan workshop Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan di Kabupaten Klaten, Rabu (31/8). Kegiatan yang digelar di salah satu hotel ini diikuti oleh guru dan tenaga pendidik SMA-SMK di Kabupaten Klaten.

Ketua Tim Transformasi Digital Sektor Strategis Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata Direktorat Ekonomi Digital, Dikki Rukmana mengatakan, agenda tersebut merupakan salah satu kegiatan dari Direktorat Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan digitalisasi di sektor strategis, khususnya di sektor pendidikan.

Menurut Dikki, workshop tersebut mematangkan penggunaan teknologi digital dalam menunjang pembelajaran yang diselenggarakan institusi pendidikan. Hal ini lantaran mode pembelajaran dengan menggunakan platform digital telah berlangsung sejak masa pandemi Covid-19. "Transformasi pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh saat pandemi lalu, kemudian saat pembelajaran tatap muka kembali digelar. Workshop ini memantapkan penggunaan platform digital dalam metode pembelajaran saat ini, kurikulum merdeka. Jadi pengalaman saat pandemi lalu, guru dan tenaga pengajar diajak untuk lebih memanfaatkan teknologi digital yang sudah ada," ungkapnya.

Kepala Diskominfo Klaten, Amin Mustofa mengapresiasi workshop adopsi teknologi digital di sektor pendidikan tersebut. Hal tersebut selaras dengan tujuan Klaten Smart City, yang saat ini tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. "Workshop adopsi teknologi digital sektor pendidikan ini menjadi forum yang baik, agar penerapan teknologi pendidikan secara substansif dan konfrensif mampu menjawab akar permasalahan pendidikan masa kini. Tantangan pendidikan di era industri 4.0 akan menuju ke perubahan cara belajar, pola pikir, serta cara bertindak para peserta didik dalam mengembangkan inovasi kreatif di berbagai bidang," kata Amin Mustofa. Menurut Amin, sudah saatnya sektor pendidikan di Klaten memanfaatkan teknologi digital secara penuh, agar berkembang lebih maju. (Sit)

DPRD GROBOGAN GELAR RAPAT PARIPURNA

Jawaban Bupati Tentang Raperda Perubahan APBD 2022



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Grobogan 2022, Rabu (31/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H Sugeng Prasetyo SE MM, dihadiri langsung Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM.

Dalam rapat paripurna ke-38 itu, juga dihadiri anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD beserta jajarannya, Kepala Bagian Setda, para Camat dan para Direktur BUMD.

Dalam penjelasannya, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mulai diperkenalkan sejak tahun 20-

19. Hal itu sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Hingga saat ini SIPD masih mengalami perubahan dan pengembangan, baik dari sisi fitur input sampai dengan laporan fitur cetaknya.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda APBD memuat lampiran ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, serta informasi lainnya

yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD.

Menanggapi permohonan penjelasan fraksi mengenai penurunan pendapatan asli daerah terutama retribusi, Bupati mengaku akan lebih mengoptimalkan rapat koordinasi pendapatan dalam menyusun rencana pendapatan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar bisa mengelola potensi pendapatan dengan baik.

Terkait dengan inovasi pajak daerah, Bupati telah melakukan berbagai upaya inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya pembayaran pajak secara online melalui aplikasi SIPADA, pelayanan perubahan SPPT PBB-P2 ditunggu jadi melalui ODS 3G (One Day Service Gampang Gelas Gratis), pelayanan PBB secara online melalui Simpel On The Way, dan pengintegrasian PBB dengan BPHTB melalui aplikasi Simpel Tenan sehingga masyarakat yang

balik nama sertifikat secara otomatis SPPT PBB-P2 akan mengikuti data sertifikat yang baru.

"Inovasi pajak daerah ini dilakukan agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses pelayanan, baik terkait pembayaran maupun perubahan data. Diharapkan dengan berbagai upaya ini dapat mendorong masyarakat untuk bisa lebih taat membayar pajak, basis data pajak menjadi lebih akurat, sehingga penghitungan potensi pendapatan daerah akan semakin terukur melalui basis data pajak yang terkini," terangnya.

Sedangkan tentang belanja daerah yang dialokasikan dalam Perubahan APBD, pada prinsipnya telah mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan, terutama untuk beberapa kegiatan fisik, mendasarkan pada peraturan yang ada, pekerjaan yang telah mendapatkan persetujuan nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD 2022, dapat dimulai proses tahapan pengadaan barang/jasa, sehingga saat Perubahan APBD telah ditetapkan, tahapan berikutnya dan pelaksanaan dapat dipercepat," jelas Sri Sumarni. (Tas)



KR-M Taslim

Rapat Paripurna DPRD Grobogan tentang penjelasan Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2022.

PGN Manfaatkan Gas Bumi Melalui Integrasi Infrastruktur

SURABAYA (KR) - Pemerintah terus berupaya mengoptimasi penemuan sumber cadangan gas baru guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional di era transisi energi, khususnya di wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Dalam waktu dekat, proyek Jambaran Tiung Biru, memungkinkan Jawa Timur memiliki surplus gas.

Demikian dikatakan General Manager PGN SOR III, Edi Armawiria saat paparan Gas Expo 2022, di Surabaya Senin (29/08). PT PGN sebagai Subholding Gas Perta-

mina siap meutiliasi potensi cadangan tersebut dengan integrasi infrastruktur gas bumi, sehingga bisa meningkatkan akses energi bagi seluruh masyarakat.

Edi Armawiria mengatakan, integrasi infrastruktur gas bumi dilakukan pada infrastruktur pipa dan non pipa. "Di Jawa, pipa gas sudah membentang di Jawa Bagian Barat dan Jawa Timur. Saat ini sedang berproses untuk menyambungkan Jawa Tengah dengan Jawa Barat melalui pipa Semarang-Cirebon. Ada beberapa inisiatif yang sedang didevelopt oleh Subhol-

ding Gas dengan badan usaha lainnya baik infrastruktur pipa maupun non pipa," tutur Edi Armawiria.

PGN SOR III melayani pemanfaatan gas bumi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan infrastruktur pipa transmisi sepanjang 961 KM dan pipa distribusi sepanjang 2.947 KM. Sementara infrastruktur non pipa untuk utilisasi Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG). Pengembangan infrastruktur non pipa dilakukan untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan gas bumi terutama untuk segmen retail seperti hotel, restoran, dan cafe. Sejumlah SPBG juga dioperasikan untuk menyediakan bahan bakar gas yang lebih hemat dan ramah lingkungan bagi transportasi, yakni SPBG Ngagel, SPBG Kaligawe, SPBG Mangkang, dan SPBG Penggaron.

PGN juga sedang mempercepat pengembangan jaringan gas rumah tangga dengan investasi mandiri, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga lebih kompetitif yang ditetapkan oleh BPH Migas dibandingkan bahan bakar non subsidi. Di Jawa Tengah-Jawa Timur, PGN

mengelola pelanggan rumah tangga sebanyak 149.115 Sambungan Rumah (SR).

"Pada prinsipnya PGN siap menyalurkan gas bumi serta mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memberi nilai tambah yang lebih banyak bagi kawasan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasokan gas bumi juga cukup untuk jangka panjang, diantaranya dari pemasok di Selat Madura dan JTB," lanjut Edi.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, dengan penemuan cadangan gas baru para pemangku kepentingan diharapkan bisa memiliki persepsi yang sama untuk memanfaatkan gas secara optimal. Termasuk mengembangkan industri berbahan baku gas di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Fatar, diperlukan sinergi untuk mendapatkan solusi bersama terkait akses produksi gas dan mencapai target penyerapan gas. "Yang harus dipikirkan adalah bagaimana bisa meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah agar nilai tambah yang dihasilkan bisa lebih besar dan mampu mem-

berikan dampak positif bagi tumbuhnya industri penunjang di kedua provinsi tersebut," ujar Fatar.

Komite BPH Migas Wahyudi Anas menambahkan, Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah terpasang pipa transmisi gas bumi dengan kapasitas besar, sehingga memudahkan pengembangan jaringan pipa-pipa distribusi gas bumi yang integrasi dan tersruktur untuk menarik investor baru di sektor Industri yang membutuhkan.

Dalam upaya optimasi pemanfaatan gas, PGN tengah menggarap proyek regasifikasi refinery milik Pertamina Group, yakni pemenuhan gas untuk GRR Tuban yang terletak 55 km dari Pipa Gresik-Semarang. Volume kebutuhan gas ±227 BBTUD pada 2027 dan 351 BBTUD pada 2028 hingga 2046.

Hingga saat ini PGN telah beroperasi di 17 Provinsi yang meliputi 67 Kabupaten/Kota di Indonesia, dan akan terus membuka wilayah baru. Berbagai segmen pelanggan yang menikmati pasokan gas bumi, mulai dari pelanggan rumah tangga, SPBG, pelanggan skala kecil, komersial, industri, dan pembangkit listrik. (Bdi)



KR-Budiono

General Manager PGN SOR III, Edi Armawiria (Pakai Batik Kuning), saat menerima penjelasan soal penemuan cadangan baru baru.

Peringatan Hari Pramuka Dipusatkan di Boyolali

BOYOLALI (KR) - Puncak peringatan Hari Pramuka Ke-61 Tingkat Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah digelar di Kabupaten Boyolali. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Jawa Tengah menjadi Inspektur Upacara yang digelar di Kebun Raya Indrokilo Boyolali (KRIB) pada Rabu (31/8).

Dalam upacara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat, Wakil Bupati (Wabup) Boyolali Wahyu Irawan, Danrem 074/Warastratama Kolonel Achirudin, Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Arm Ronald Siwabessy dan jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali beserta dengan Kepala OPD se-Kabupaten Boyolali.

Ganjar mengatakan telah banyak kontribusi Gerakan Pramuka di Provinsi Jateng yang cukup besar berperan dalam membantu masyarakat. Banyak sekali partisipasi dari Pramuka.

Sangat luar biasa, tinggal bagaimana menggerakkannya. "Tentu pembinaannya harus mendampingi terus menerus agar mereka adaptif, kreatif, dan inovatif," ungkap Ganjar.

Menurutnya, melalui cerita cerita yang baik dan positif yang telah dilakukan oleh pramuka, dapat memberikan pemahaman dalam hal literasi digital, mencegah Hoax atau berita palsu sehingga mampu menginspirasi orang lain. Selain itu, Gubernur Ganjar juga meminta Gerakan Pramuka untuk praktik di lapangan agar manfaat Pramuka lebih teras di tengah masyarakat.

"Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan kreatif mereka hanya barangkali tidak terlalu banyak eksposnya. Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mengurus Saka Milenial, itu kan mereka sangat melek dengan teknologi informasi, digital, dan medsos. Maka sampaikan cerita-cerita me-

narik, sampaikan cerita-cerita positif," ujar Ganjar. Terkait dengan arahan Ganjar soal program *Ojo Kawin Bocah*, Bupati Said menyambut baik program tersebut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah hadir dan melakukan sosialisasi tentang pernikahan di usia bocah.

"Boyolali juga mengikuti arah kebijakan yang sama. Karena ini adalah merupakan bagaimana kita bersama hadir untuk penanganan stunting di Kabupaten Boyolali. Tentunya kita juga melaksanakan apa yang menjadi arah kebijakan gubernur dan sosialisasi tentang *Ojo Kawin Bocah* pada anak-anak kita ini memang perlu karena ini juga termasuk bagian ketika kita bersama dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Boyolali," jelas Bupati Said.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Boyolali, Supana mengatakan terdapat rangkaian kegiatan peringatan Hari Pramuka Ke-61 Tingkat Kwarda Jawa Tengah. Antara lain, penanaman pohon di area KRIB dan perkemahan yang diikuti oleh 700 peserta dari Pramuka penggalang dan penegak selama dua hari yakni Selasa-Rabu (30-31/8).

Dalam acara tersebut, Pramuka Kwarcab Boyolali menerima penghargaan Pancawarsa ke-7 sesuai dengan jumlah penghargaan. (R-3)

Bupati Klaten Lantik Pejabat Fungsional



KR-Sri Warsiti

Bupati Klaten melantik pejabat fungsional.

KLATEN (KR) - Sebanyak 216 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Klaten resmi dilantik di Pendopo Kabupaten Klaten, Rabu (31/8). Para pejabat fungsional tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, fungsional teknik, dan guru.

Pelantikan tersebut turut serta dihadiri oleh Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, Asisten Bupati, Kepala OPD, tokoh agama dan tamu undangan lain. Bupati Klaten, Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan dengan momentum pelantikan tersebut dapat memberikan suntikan semangat dalam memberika pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjalankan amanah dari pemerintah sebagai pribadi yang dapat dipercaya.

Oleh karena itu, Bupati menyebut para pejabat yang dilantik harus mengerjakan tugas secara proporsional dan melaksanakan pelayanan publik dengan maksimal.

"Selalu berkarya dan berprestasi dalam melayani masyarakat Kabupaten Klaten. Momentum ini harus dijadikan semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tolong di ingat, anda ini menjadi generasi penerus kedepan. Sehingga perlu adanya semangat untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, Bupati berharap semoga para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan lantik profesional, berdedikasi tinggi, dan loyal, untuk kemajuan Kabupaten Klaten. (Sit)



KR-Mulyawan

Ganjar Pranowo menjadi irup peringatan Hari Pramuka ke-61 di Indrokilo, Boyolali.